



**EKSISTENSI PERADILAN PIDANA ADAT DI PROVINSI PAPUA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KHUSUS (PERDASUS)
NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PERADILAN ADAT DI PAPUA**
*(The Existence Of Traditional Criminal Justice In The Province Of Papua Is Based
On Special Regional Regulation (Perdasus) Number 20 Of 2008 Concerning
Traditional Justice In Papua)*

TESIS

***Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih***

Oleh :

**JEVRI OLOS TARSAN AGAKI
NIM. 2022025015122**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

**EKSISTENSI PERADILAN PIDANA ADAT DI PROVINSI
PAPUA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KHUSUS
(PERDASUS) NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG
PERADILAN ADAT DI PAPUA**

*The Existence Of Traditional Criminal Justice In The Province Of Papua Is Based On Special
Regional Regulation (Perdasus) Number 20 Of 2008 Concerning Traditional Justice In Papua*

**Telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal : 22 Juni 2024**

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. FRANS REUMI, S.H., M.A., M.H
NIP. 19600713 198903 1 002

Pembimbing II



Dr. BUDIYANTO, S.H., M.H
NIP. 19660124 199303 1 001

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Dr. MARTHINUS MAMBAYA, S.H., M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002


PELAKSANAAN UJIAN

Tesis ini telah diuji pada tanggal, 22 Juni 2024

TIM PENGUJI


Prof. Dr. FRANS REUMI, S.H.,M.A.,M.H
NIP. 19600713 198903 1 002

Ketua


(.....)

Dr. BUDIYANTO, S.H.,M.H
NIP. 19660124 199303 1 001

Sekretaris


(.....)

Dr. MARTHINUS MAMBAYA, S.H.,M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002

Anggota


(.....)

JOHAN RONGALAHA, S.H.,M.Hum
NIP. 19600828 199003 1 003

Anggota

(.....)

Dr. KRISTINA SAWEN, S.H.,M.H
NIP. 19780924 200212 2 001

Anggota


(.....)

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Nama : JEVRI OLOS TARSAN AGAKI

NIM : 2022025015122

Judul Tesis : Eksistensi Peradilan Pidana Adat Di Provinsi Papua Berdasarkan Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat Di Papua.

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jayapura, Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,

**JEVRI OLOS TARSAN AGAKI
NIM. 2022025015122**

ABSTRAK

Jevri Olos Tarsan Agaki. “Eksistensi Peradilan Pidana Adat Di Provinsi Papua Berdasarkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat Di Papua”, dibimbing oleh Prof. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H, sebagai pembimbing I dan Dr. Budiyanto, S.H., M.H.. sebagai pembimbing II.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian juridis empiris dengan mengutamakan data lapangan dan data pustaka hukum dengan teknik pengumpulan data wawancara dan pengamatan dengan dukungan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, serta pendekatan Perundang-undangan, sejarah hukum, dan pendekatan perbandingan hukum. Data yang diperoleh diolah dengan teknik analisis kualitatif dengan tiga alur kerja; yakni, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang Pengakuan terhadap Eksistensi Peradilan Adat dan Peradilan Pidana Adat dalam UU Otsus Papua, terletak pada orientasi pemahaman masyarakat hukum adat Papua terhadap konsep Peradilan Adat dan Peradilan Pidana Adat dalam Perdasus Nomor 8 Tahun 2008 yang secara delegatif memberi pengakuan kewenangan mengatur eksistensi peradilan pidana adat di Papua. Dengan mempertimbangkan Peraturan Daerah (Perda) : Kewenangan, Proses Peradilan, Putusan, Eksistensinya dalam system hukum, : Eksistensi dalam Sistem Hukum Nasional. Sehingga dipahami dengan diundangkannya Perdasus Nomor 8 Tahun 2008 memberikan landasan hukum yang kuat bagi eksistensi peradilan pidana adat di Papua. Perda ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk mengakui, menghormati, dan melindungi sistem hukum adat Papua, serta meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat hukum adat di Papua. Esensi Utama Pengakuan Eksistensi Peradilan Pidana Adat di Papua dengan memperhatikan aspek 1) Pengakuan Hak Asasi Manusia Orang Asli Papua:2) Kearifan Lokal dan Nilai Budaya, 3) Memperkuat Otonomi Khusus Papua, 4) Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum, 5) Mewujudkan Keadilan dan Perdamaian: Peradilan adat mengedepankan pendekatan penyelesaian sengketa secara damai dan kekeluargaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua, eksistensi peradilan pidana adat di Papua diwujudkan : 1) Pengakuan kewenangan peradilan adat dalam mengadili perkara pidana adat. 2)Penetapan proses peradilan adat yang harus adil, transparan, dan akuntabel. 3)Penghormatan dan perlindungan hak-hak terdakwa dalam peradilan adat. 4)Pengakuan putusan peradilan adat yang telah berkekuatan hukum tetap.Eksistensi peradilan pidana adat di Papua merupakan bagian penting dari sistem hukum di Papua. Pengakuan dan keberlakuan peradilan adat ini diharapkan dapat berkontribusi pada penegakan hukum yang adil, mewujudkan keadilan dan perdamaian, serta memperkuat otonomi khusus dan pelestarian budaya di Papua.

Kata Kunci : *Peradilan Adat, Otonomi Khusus Provinsi Papua.*

ABSTRACT

Jevri Olos Tarsan Agaki. " The Existence Of Traditional Criminal Justice In The Province Of Papua Is Based On Special Regional Regulation (Perdatus) Number 20 Of 2008 Concerning Traditional Justice In Papua", supervised by Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H, as supervisor I and Dr. Budiyanto, S.H., M.H.as supervisor II.

The research method is empirical juris method emphasis with field data and literature which is collected by interview and observation supported by secondary data, it sourced from primary, secondary and tertiary legal materials as well as approaching to rule, legal history and comparative law. The data obtained are processed by three workflow namely data reduction, data presentation and verification (conclusion).

The research results show that the background to the recognition of the existence of customary justice and customary criminal justice in the Papua Special Autonomy Law lies in the orientation of the Papuan customary law community's understanding of the concept of customary justice and customary criminal justice in Perdatus Number 8 of 2008 which delegatively recognizes the authority to regulate the existence of customary criminal justice in Papua. By considering Regional Regulations (Perda): Authority, Judicial Process, Decisions, Existence in the legal system, : Existence in the National Legal System. So it is understood that the promulgation of Perdatus Number 8 of 2008 provides a strong legal basis for the existence of customary criminal justice in Papua. This regional regulation is a concrete manifestation of the government's commitment to recognize, respect and protect the Papuan customary law system, as well as increase access to justice for customary law communities in Papua. The Main Essence of Recognizing the Existence of Customary Criminal Justice in Papua by paying attention to aspects 1) Recognition of the Human Rights of Indigenous Papuans: 2) Local Wisdom and Cultural Values, 3) Strengthening Papua's Special Autonomy, 4) Increasing the Effectiveness of Law Enforcement, 5) Realizing Justice and Peace : Traditional justice prioritizes a peaceful and family approach to resolving disputes. Based on Papua Special Regional Regulation Number 20 of 2008 concerning Customary Courts in Papua, the existence of customary criminal justice in Papua is realized in: 1) Recognition of the authority of customary courts in adjudicating customary criminal cases. 2) Establishment of a customary justice process that must be fair, transparent and accountable. 3) Respect and protect the rights of the accused in customary justice. 4) Recognition of customary court decisions that have permanent legal force. The existence of customary criminal justice in Papua is an important part of the legal system in Papua. It is hoped that the recognition and application of customary justice can contribute to fair law enforcement, realizing justice and peace, as well as strengthening special autonomy and preserving culture in Papua.

Keywords: Customary Court, Special Autonomy for Papua Province.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Ketahuiilah, demikian hikmat untuk jiwamu: Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang.

(Amsal 24:14)

Kupersembahkan Tesis ini kepada :

1. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua nikmat yang telah di berikan.
2. Ayahandaku dan Ibundaku tercinta atas semua pengorbanan dan kasih sayang yang tulus dan ikhlas sejak kecil hingga dewasa yang tidak akan pernah saya balas sampai kapanpun.
3. Saudara dan Saudariku dan atas dukungan dan doa yang selalu menjadi pendorong dan pemberi semangat kepadaku.
4. Almamaterku Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
5. Tanahku Papua dimana aku dilahirkan dan dibesarkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas curahan kasih, rahmat dan karuniaNya, sehingga Tesis ini dapat disusun dan dirampungkan, kendati masih terdapat berbagai kurang sempurnaan dari aspek substansi, struktur maupun ragamnya. Rampungnya Tesis ini bukan hanya jerih payah penulis sendiri, melainkan atas dorongan, bantuan, dan partisipasi banyak pihak, oleh karena itu adalah lumrah melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E.,M.Sc.Agr., Rektor Universitas Cenderawasih, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Pembimbing I, atas segala kebijakannya telah menerima dan memperkenankan penulis belajar dan menimba ilmu pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
4. Bapak Dr. Budiyanto, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II, awal penyusunan Tesis ini, dalam kesibukan akademiknya masih meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis sampai Tesis ini dapat dirampungkan sesuai jadwal akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih, antara lain: Prof. Dr. Melkias Hetaria, S.H.,M.Hum, Dr. Eddy Pelupessy, S.H., M.Hum., Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A., Dr. Marthinus Solossa, S.H., M.Hum., Dr. William Reba,

S.H., M.Hum., Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum., Dr. Lily Bauw, S.H., M.Hum., Dr. Supriyanto Hadi., S.H., M.Hum., Dr. Budiyanto, S.H., M.H., Dr. Josner Simanjuntak, S.H., M.Hum., Dr. Yantje Liauw, S.H., M.Hum., Dr. Y.D.W. Susi Irianti, S.H., M.Hum., Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum., Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H., Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum., Dr. Hotlan Samosir, S.H., M.H., Dr. Herry M. Polontoh, S.H., M.Hum., Dr. Marudut Hasugian, S.H., M.Hum., Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum., Dr. Yusak E. Reba, S.H., M.H., Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H., Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H., Dr. Karel V.H Baransano, S.H., M.H., Rehabeam Mofu, S.H., M.H., Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum., Johan Ronggalaha, S.H., M.Hum., Victor Th. Manengkey, S.H., M.H.

6. Bapak dan Ibu serta Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum yang senantiasa melayani semua keperluan administrasi selama penulis menempuh studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Cenderawasih.
7. Rekan-rekan seperjuangan yang turut memberikan dorongan moril dan semangat kepada penulis hingga rampungnya penulisan Tesis ini.

Semoga segala pengorbanan, dorongan dan bantuannya mendapat balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, disertai harapan Tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Jayapura, Juni 2024

Salam Hormat

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iii
PELAKSANAAN UJIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTARCT	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAM	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian	23
D. Manfaat Penelitian	24
E. Metode Penelitian	25
1. Tipe Penelitian	15
2. Lokasi Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Populasi dan Sampel	20
5. Jenis dan Sumber Data	20
6. Teknik Prosedur Pengumpulan Data	21
7. Analisis Data	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Beberapa Konsep Yang Digunakan	31
B. Kedudukan Peradilan Adat dan Peradilan Adat Dalam Konstitusi	37
C. Landasan Teori Dan Kerangka Pikir	47
1. Teori Negara Hukum	47
2. Teori <i>The Living Law</i>	57
3. Teori Keputusan (<i>Beslissingenleer</i>) Ter Haar	62
4. Kerangka Pikir	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Latar belakang Pengakuan Eksistensi Peradilan Pidana Adat di Papua dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua	72
B. Implementasi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Nomor: 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua kaitang Peradilan Pidana Adat Berdasarkan Landasan Filosofis, Sosiologis,	

dan yuridis dengan UU Drt Nomor : 1 Tahun 1951 dan Pasal 1 Rancangan UU KUHP Nasional	97
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92